

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta memiliki daya tarik yang besar tidak hanya sebagai ibu kota negara namun juga sebagai pusat politik, ekonomi dan bisnis di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Bahkan sejak zaman kolonial belanda, Jakarta sudah menjadi pusat ekonomi, politik, media, budaya dan pendidikan di Indonesia.¹ Daya tarik ini membuat banyak suku bangsa memberanikan diri untuk mengadu nasib di ibu kota. Oleh karena itu, Jakarta termasuk dalam provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar di Indonesia. Tercatat penduduk DKI jakarta berjumlah 10.177.924 Jiwa². Jumlah penduduk yang besar ini ditandai dengan kondisi sosiologis masyarakat jakarta yang multikultur. Tercatat etnis dan suku bangsa yang mendiami Jakarta antara lain: Jawa, Betawi, sunda, tionghoa, batak, minang, melayu, bugis, madura, banten, banjar, minahasa dan lain-lain³. Kenaekaragaman etnis dan suku di Jakarta dapat menjadi modal besar dalam pembangunan baik politik maupun ekonomi, namun rentan terjadi benturan dan dapat menjadi potensi konflik di kemudian hari jika tidak mampu dikelola dengan baik.

Terbukti menurut laporan BPS, tercatat pada tahun 2014 ada Sepuluh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) tertinggi antara lain Kelurahan Galur, Tanah Tinggi, Kampung Melayu, Kartini, Johar Baru, Kalibaru, Kampung Rawa, Penjaringan, Kebon Melati, dan Menteng⁴. Dari data tersebut, diketahui bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki potensi terjadinya konflik. Sejalan dengan definisi Surbakti bahwa Konflik bermakna benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan

¹ Sebagaimana diceriterakan dalam bibliografi tentang Batavia, karangan Ebing dan Youetta de Jager terbitan KTLIV (2001). Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33, 1, 3-6.

² BPS DKI Jakarta. 2017. <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/24/91/3-1-2-jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html>

³ BPS DKI Jakarta. 2000

⁴ BPS DKI Jakarta. 2014. Indeks Potensi Kerawanan Sosial Provinsi DKI jakarta Tahun 2014

pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah⁵. Konflik seakan tidak dapat lepas dari kehidupan sosial manusia. Sejalan dengan Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik dilihat sebagai sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat.⁶

Kerawanan sosial ini apabila tidak dapat diselesaikan dan dicegah sejak dini, maka dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik bahkan dapat berujung konflik di Jakarta. Padahal sejak tahun 2014 dan 2015, provinsi DKI Jakarta meraih provinsi paling demokratis di Indonesia berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia⁷. Akan tetapi, dari 2015 mengalami penurunan indeks demokrasi dari 85,32 poin menjadi 70,85 poin pada 2016⁸. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan salah satunya akibat terjadinya demo yang disertai kekerasan yang cukup tinggi dan durasi yang cukup lama, serta berkaitan erat dengan pelaksanaan Pilkada DKI dan kampanye pemilihan kepala daerah⁹. Penurunan ini juga disebabkan oleh aturan tertulis dan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan agama. Selain itu, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok pada kelompok lain terkait ajaran agama.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (2015) merilis data telah terjadi 245 kasus kekerasan selama tahun 2015 di Jakarta¹⁰. Secara berkesinambungan DKI Jakarta mengalami peristiwa yang menimbulkan gesekan dan benturan di masyarakat. Benturan dan konflik pun tercatat berlangsung pada medio 2013-

⁵ Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 149

⁶ Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media Hlm. 55

⁷ <http://bprd.jakarta.go.id/2017/06/08/fgd-indeks-demokrasi-indonesia-idi-tahun-2016/>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya>

⁹ <https://katadata.co.id/berita/2017/09/14/indeks-demokrasi-jakarta-anjlok-drastis-akibat-kampanye-pilgub>

¹⁰ <http://snpk.kemenkopmk.go.id/DataTools/QueryBuilder?lang=ina&randdo=29606ac2-cc20-4a7c-9d83-19e6e953bfec&userid=13245306>

2015, sebagaimana terdata kemendagri¹¹ yang mencatat pada tahun 2015 (medio kuartal Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi di Indonesia 26 kasus, dengan eksek konflik politik berjumlah 2 kasus, dengan sumbangan terbesar dari provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 kasus.

Selain data kekerasan konflik yang tercatat di atas, fenomena kekerasan dan konflik di DKI Jakarta semakin nampak di permukaan pada pelaksanaan pilpres 2014 dan pilgub DKI Jakarta 2017. Fenomena ketegangan dan konflik ini mengkristal akibat polarisasi politik yang terbentuk dari masyarakat hingga elit politik. Apabila polarisasi politik dibiarkan di masyarakat, maka akan bergerak menjadi kekerasan dan berakhir dengan konflik (perang). Ketegangan ini terjadi secara fisik atau non fisik, di dunia maya maupun di dunia nyata. Terbukti usai pilpres tahun 2014 masih terjadi fenomena ketegangan yang berujung kekerasan dan konflik di masyarakat. Ketegangan yang bermula dari sekedar perbedaan pandangan dan rivalitas politik, kemudian memanasi menjelang pilgub DKI Jakarta 2017 dengan dibumbui isu-isu berbau SARA.

Seharusnya kemajemukan masyarakat Jakarta dapat menjadi jembatan penghubung keberagaman, bukan menjadi jurang pemisah antar kelompok sosial yang ada. Terlebih DKI Jakarta merupakan wilayah yang sangat heterogen dan multikultur, namun rentan terhadap konflik dan budaya kekerasan. Sesuai dengan penjelasan Susan (2009) bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong *vulnerable society* (masyarakat rentan) diantaranya karena tingginya segregasi sosial, serta rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi.¹²

Temuan dari Poltracking Indonesia per Februari 2017, menyebutkan bahwa dari 800 Responden DKI, didapatkan hasil 24.11% responden masih bisa berubah pilihan. Responden yang bisa berubah ini akan terpengaruhi oleh isu di media sosial sebanyak 21.39%, terpengaruhi visi, misi dan program kerja pasangan calon sebanyak 12.24%. Adapun terkait latar belakang aktor penentu pilihan kandidat, 2 besar hasilnya berupa latar belakang agama sebanyak 27.77% dan Faktor kinerja

¹¹ Dapat dilihat di: <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2015/350/Data-Konflik-Sosial>

¹² Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media. Hal. 2

sebesar 26.28%¹³. Hasil survei ini tidak mengindikasikan secara langsung pendukung pasangan salah satu calon. Namun, hal ini menandakan bahwa identitas agama menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan pilihan politik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Selain itu Bawaslu RI mengeluarkan rilis resmi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, dan menempatkan DKI Jakarta pada posisi ke 5 dari 7 Daerah terawan penyelenggaraan pemilu tahun 2017¹⁴. Dalam IKP tahun 2017 ini, mengambil contoh DKI Jakarta, disebutkan bahwa dimensi yang memiliki kerawanan dalam pilkada DKI adalah dimensi kontestasi dengan variabel kerawanan tinggi berada pada variabel pencalonan, kampanye, dan kontestasi¹⁵.

Pilgub DKI Jakarta sangat menyedot perhatian masyarakat, tidak lepas dari pengaruh pilpres tahun 2014 pada pelaksanaan pilkada DKI 2017. Sejatinya politik merupakan hubungan dan keterkaitan peristiwa politik sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, pilpres tahun 2014 diwarnai oleh polarisasi politik di kalangan elit politik dan masyarakat Indonesia berdasarkan calon yang didukung. Pasangan Jokowi-JK yang menamai kelompoknya sebagai koalisi Indonesia hebat seperti PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan lain-lain. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta diusung oleh koalisi PKS, Gerindra, PAN, dan menamai diri koalisi merah putih. Polarisasi partai pengusung dan masyarakat pendukung yang terjadi di pilpres 2014 ini, masih meninggalkan *residu* pengaruh pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta 2017.

Terbukti polarisasi politik tetap terjadi dengan terbentuknya dua kekuatan besar politik di Pilgub DKI tahun 2017 terlebih pada putaran kedua. Partai pengusung koalisi Indonesia hebat mendukung Basuki Jarot, sedangkan koalisi merah putih mendukung pasangan Anies Sandi. Akibat polarisasi yang diteruskan hingga Pilgub DKI 2017 ini, akhirnya menimbulkan keresahan dan ketegangan di masyarakat.

Ketegangan yang terjadi kemudian membuat fenomena identitas sosial di masyarakat terbentuk. Berawal dari proses kategorisasi sosial hingga bentuk *in group out group* berupa istilah *cebongers*, bani cingkrang, sumbu pendek, bani

¹³ Laporan Survei Pilgub DKI Jakarta. Persepsi dan perilaku pemilih menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. 6-10 Februari 2017. Poltracking Indonesia. Dapat diunduh di www.poltracking.com

¹⁴ Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Bawaslu RI

¹⁵ Rikson H. Nababan. 2016. Jurnal Bawaslu DKI. Edisi Oktober 2016 hal. 50

taplak sampai pasukan nasi bungkus. Terjadi juga identifikasi pada masyarakat dengan mengelompokkan diri pada teman ahok dan sahabat anies sandi. Akhirnya terjadi komparasi antar kelompok, komparasi ini membuat persepsi dan keyakinan bahwa kelompoknya adakah benar dan kelompok lain adalah salah. Hal ini dijumpai pada kasus penolakan menyolatkan pendukung Basuki yang meninggal di masjid pendukung Anies Sandi. Proses ini membawa dampak negatif berupa munculnya stereotip, prasangka bahkan diskriminasi antar masyarakat. Kemudian demonstrasi berskala besar dan membawa identitas agama seperti 411 dan 212 menjadi *trigger* bagi ketegangan yang ada.

Jakarta sebagai etalase Indonesia sekaligus *Center of Gravity* (CoG) sepatutnya dapat menjadi percontohan pesta demokrasi yang sehat dan aman. Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, menyajikan kepada kita tentang bagaimana gambaran ketegangan dan konflik politik di Indonesia terjadi. Proses dan fenomena yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta sangat menarik disimak, dikaji dan dianalisis, oleh pengamat maupun akademisi dari dalam dan luar negeri. Selain posisi strategis DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, pilgub DKI Jakarta juga sering menjadi barometer untuk penyelenggaraan hajat demokrasi di Indonesia¹⁶. Maka tak heran jika ada rumor yang beredar bahwa Pilgub DKI Jakarta adalah miniatur pemilu presiden Indonesia.

Fenomena yang terjadi dalam proses politik pada Pilgub DKI Jakarta, mengindikasikan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Misalnya, pada saat pemungutan suara dilaporkan terjadi perkelahian antara pendukung pasangan calon dengan petugas pemungutan suara dan warga sekitar di wilayah gambir, dilaporkan 1 orang mengalami luka-luka (liputan6.com)¹⁷. Atau menurut rilis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada tahun 2017, DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Januari hingga Oktober. Pelanggaran HAM, khususnya dari sisi kebebasan berekspresi, DKI Jakarta merupakan daerah dengan pelanggar terbesar akibat pilkada lalu. Menurut data KontraS, terjadi 33 peristiwa dengan mengakibatkan sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang

¹⁶ Endang Sulastri. 2016. Mewujudkan Pilkada DKI yang Berintegritas dan Bermartabat. Jurnal Bawaslu DKI Jakarta Edisi Oktober 2016

¹⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/2858045/mengupas-pelanggaran-pilkada-dki-2017>

mengalami intimidasi¹⁸. Kondisi ini sesuai prediksi Bawaslu DKI sebelum pilkada DKI berlangsung bahwa Pilgub DKI Jakarta akan berlangsung dinamis, terbuka dan kompetitif. Bahkan persaingan politik dalam pilkada DKI diwarnai dengan berbagai insiden konflik baik antar elit, antar pendukung, maupun antara pendukung dengan elit. Insiden berupa konflik kekerasan baik fisik maupun non fisik, *hate speech* di tengah masyarakat serta ditambah memanasnya Isu SARA saat pilkada berlangsung.

Selain itu seharusnya tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi sosok yang mampu mencairkan ketegangan di masyarakat. Akan tetapi tak jarang mereka secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon dan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Terlebih dukungan politik ini dilakukan di ruang terlarang berpolitik seperti tempat ibadah. Keadaan ini akhirnya menjadi katalis yang memperkuat terbentuknya segregasi dan polarisasi politik di Pilgub DKI Jakarta. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 sebagai aturan utama dalam penanganan permasalahan konflik sosial mengamanatkan bahwa masyarakat bertanggung jawab dalam proses dan upaya pencegahan sejak dini terjadinya konflik di daerah masing-masing. Dalam hal ini peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat menjadi penting dan vital. Ketegangan dan konflik politik yang bernuansa SARA pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta akhirnya berakibat pada penurunan perolehan 10 poin indeks demokrasi Jakarta yang pada dua tahun berturut-turut sebelumnya meraih kota paling demokratis di Indonesia.

Akan tetapi, pada pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkada DKI Tahun 2017 tidak terjadi eskalasi konflik yang meningkat sampai terjadi konflik kekerasan bahkan terjadi proses de-eskalasi. Sehingga Pilgub DKI Jakarta dapat dilalui dengan aman dan damai, sejak pemungutan suara sampai penentuan pemenang Pilgub DKI Jakarta tampak tidak terjadi gesekan di masyarakat yang berujung pada konflik kekerasan. Hal ini terjadi salah satunya adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh pihak yang terkait dalam melakukan upaya pencegahan konflik pada pilkada DKI Tahun 2017.

¹⁸ <https://tirto.id/kontras-pelanggaran-ham-tertinggi-terjadi-di-jakarta-cBtQ>

Terbukti, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui badan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab sebagai lembaga membuat kebijakan strategi sekaligus melakukan upaya pencegahan konflik dan penanganan konflik sosial di DKI Jakarta termasuk di dalamnya permasalahan konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta. Upaya ini sebagai bentuk implementasi sistem deteksi dini konflik, manajemen konflik dan resolusi konflik sesuai yang diamanatkan oleh UU No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Konflik pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017” menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan mampu mengkaji fakta lebih dalam serta memberikan kontribusi dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional terutama di wilayah DKI Jakarta.

1.2 Fokus dan subfokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ilmiah dilakukan untuk membatasi penelitian terhadap satu masalah yang diperdalam sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan konflik di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Adapun subfokus penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Menganalisis potensi konflik apa saja yang muncul pada pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.
- 1.2.2 Menganalisis bagaimana peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

1.3 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah berupa kekerasan yang berkembang di masyarakat yang diakibatkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, faktor yang menjadi potensi konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian berupa “peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam pencegahan konflik di DKI Jakarta, studi kasus pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017”.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

- 1.3.1 Bagaimana potensi konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017?
- 1.3.2 Bagaimana peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- 1.4.1 Untuk menganalisis potensi konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017
- 1.4.2 Untuk menganalisis peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta pencegahan konflik Pilgub DKI Jakarta tahun 2017

1.5 Manfaat penelitian

- 1.5.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya penerapan teori dan konsep yang telah dipelajari dalam proses belajar pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian mengenai upaya pencegahan potensi konflik di DKI Jakarta dan imbasnya pada keamanan dan pertahanan negara.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pertahanan di Indonesia, mengingat ilmu pertahanan sedang mengokohkan jati dirinya sebagai sebuah cabang keilmuan.

Berdasarkan dua hal pokok yang diuraikan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian dengan tema terkait, yaitu damai dan resolusi konflik serta ilmu pertahanan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran mengenai peran dan strategi preventif dan sistematis badan kesatuan bangsa

dan politik provinsi DKI Jakarta terhadap potensi konflik yang terjadi di DKI Jakarta sebagai upaya pencegahan konflik di DKI Jakarta.

1.5.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga terkait tentang potensi konflik yang muncul pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, upaya pencegahan konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 serta dapat digunakan sebagai strategi menghadapi pemilu tahun 2019 di DKI Jakarta. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga lembaga yang bertanggungjawab terhadap penanganan konflik sosial di DKI Jakarta termasuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum, antara lain: badan kesatuan bangsa dan politik DKI Jakarta, KPU provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, POLRI dan TNI.

Hal tersebut dirasa perlu karena dapat mendukung terimplementasikannya seluruh rekomendasi yang diberikan guna keberlanjutan perdamaian dan pencegahan konflik di DKI Jakarta.